

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender merupakan sebuah konsep yang memang selama ini dapat dikatakan pemicu ketidaksetaraan hubungan perempuan dan laki-laki, yang di mana selalu sisi perempuan ada pada status sosial yang di nilai lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tindakan diskriminasi pada perempuan adalah hal yang dapat kita ketahui sebagai melanggar hak asasi manusia, yang kemudian pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan supaya perempuan bisa mendapatkan memperjuangkan hak-haknya yang tidak diperbolehkan (Sudiarti et al., 2000). Kesetaraan dapat dikatakan masih isu yang ramai terhadap di Indonesia. Menurut penelitian yang berjudul “Perempuan dan Kemiskinan”, dikatakan bahwa rumah tangga adalah salah satu faktor adanya diskriminasi dan subordinasi pada perempuan dalam kesetaraan gender dan kemiskinan. Ketidakadilan dalam alokasi sumber daya rumah tangga memperlihatkan bahwa perempuan dengan laki-laki mempunyai tipe kemiskinan yang beda. Kemiskinan perempuan yang ada di dalam ruang publik selalu dihubungkan dengan ruang tertutup bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam hal pengambilan keputusan (Indraswari, 2009).

Contohnya seperti Ibu Eros dan Ibu Reno yang mempunyai situasi serupa sebagai ibu kepala rumah tangga yang menghidupi cukup banyak anak dan cucu (Tribun News, 2021). Keduanya, tidak bisa memakai KB karena efek samping yang berlebihan dan untuk berobatnya akan jauh lebih mahal. Mereka juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan tidak memiliki pendidikan yang tinggi.

Sehingga, mereka harus menghidupi seluruh keluarganya dengan penghasilan yang tidak besar. Contoh tersebut hanya dua dari banyak sekali kasus-kasus kemiskinan terhadap perempuan, di sini terlihat bahwa perempuan kurang berdaya, kurang kesempatan, dan kurang keamanan.

Pentingnya masalah ini untuk para perempuan adalah ketidaksetaraan gender ini telah meningkatkan kemiskinan pada perempuan, dan begitu juga sebaliknya, kemiskinan itu sendiri memperburuk ketidaksetaraan gender. Wacana tentang kemiskinan tersebut tidak dapat menghilangkan masalah perbedaan oleh laki-laki dan perempuan miskin, karena kaum perempuan tersebut mereka miskin atau tidak miskin, mereka wajib pergi dengan bekal, yaitu pendidikan, ekonomi akses, dan lain-lain, berbeda dari laki-laki.

Dalam kasus-kasus tersebut telah membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia untuk lebih memikirkan hal dalam cara untuk kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam ruang internasional, institusi RI ini telah kerja sama bersama melalui CSW (*The Commission on the Status of Women*). CSW tersebut adalah lembaga yang dibawah oleh *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). CSW sendiri merupakan kepala badan antar-pemerintah global yang khususnya berkontribusi untuk memperkenalkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. CSW mempunyai peran yang penting dalam hal menawarkan hak-hak perempuan, dan membuat standar global atas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Program MAMPU, n.d.-b). Indonesia sendiri telah membentuk kerja sama bersama dengan Australia karena menurut kedua negara ini kesetaraan gender ini

adalah salah satu termasuk poin penting yang ingin diraih dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang kelima yaitu *gender equality*. Untuk kepentingan terhadap peningkatan akses terhadap perempuan terhadap pemerintah, Australia dan Indonesia membuat program untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu, MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) (Sindo News, 2019).

Program MAMPU ini bergerak dalam peningkatan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, yang berguna untuk mengembangkan akses perempuan yang miskin di Indonesia pada layanan penting dan program pemerintah, dan membantu menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Program ini memiliki hubungan dengan 5 tema, yaitu menunjukkan akses perempuan miskin untuk melindungi dari sosial pemerintah, menunjukkan akses perempuan terhadap pekerjaan dan dihapusnya tindakan diskriminasi di wilayah tempat kerja, mengembangkan tenaga kerja perempuan yang ingin bekerja di luar negeri, mengembangkan perempuan untuk mempunyai reproduksi yang baik dan sehat, mengembangkan kepemimpinan perempuan untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan, bekerja sama dengan parlemen (BaKTI, n.d.).

Program MAMPU ini telah mencapai berbagai pencapaian. Mereka telah membantu menguatkan lebih dari tujuh puluh ribu perempuan melewati kontribusi mereka di lebih dari 3.500 kelompok lokal di dua puluh tujuh provinsi di Indonesia (Bakti News, 2020). Akan tetapi, program MAMPU tersebut diberhentikan pada akhir bulan Desember 2020, yang penulis ingin teliti adalah pencapaian-pencapaian apa saja yang ada pada dalam Program MAMPU. Maka dari itu, setelah program

ini berlangsung delapan tahun dari 2012 sampai 2020, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam bagaimana kesesuaian kerja sama Indonesia dengan Australia dalam Program MAMPU yang berdasarkan teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dibahas, penulis merumuskan masalah yaitu, “Bagaimana kesesuaian kerja sama Indonesia dengan Australia selama menjalankan program MAMPU di Indonesia berdasarkan teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana kerja sama Indonesia dengan Australia melalui Program MAMPU.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana kesesuaian dari kerja sama Indonesia dengan Australia dengan menjalankan program MAMPU selama delapan tahun dari 2012-2020 berdasarkan teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah ditemukannya penjelasan yang berbeda berkaitan dengan kerja sama Indonesia dengan Australia pada Program MAMPU berdasarkan teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral yang hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur di dalam studi Hubungan Internasional terutama dalam topik yang terkait dengan perempuan dan kesetaraan gender. Manfaat lainnya yang didapatkan dari penelitian ini adalah tambahan literatur mengenai keberhasilan Program MAMPU, dan juga memperkaya kajian tentang feminisme liberal.

1.4.2 Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang pencapaian kerja sama Indonesia dengan Australia dalam Program MAMPU yang berkaitan dengan isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan apakah sudah berdasarkan teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang kerja sama Indonesia – Australia melalui Program MAMPU sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama adalah Desi (2019) dengan judul “Kerja sama Australia-Indonesia melalui MAMPU dalam

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2014-2018)” meneliti kerja sama apa saja yang dilaksanakan MAMPU terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah MAMPU telah berkembang dalam akses layanan, tetapi belum dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Julita (2017) dengan judul “Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan) untuk Pemberdayaan Perempuan” meneliti keuntungan kemitraan dari tiap-tiap organisasi perempuan yang bekerja sama dengan Program MAMPU. Penelitian ini membuktikan bahwa sejak tahun 2012 sampai 2020 Program MAMPU berhasil untuk menaikkan tingkat pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Penelitian ketiga oleh Nasira (2017) berjudul “Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)”. Hasil penelitian tersebut adalah Yayasan LP2EM dapat memberikan dampak positif dalam berjalannya Program MAMPU di kota Parepare. Terakhir, Anissa (2019) dengan judul “Implementasi Program MAMPU Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Gender di Indonesia” meneliti tentang program MAMPU tersebut dan menguraikan kesesuaian penerapan program ini sebagai instrumen kepentingan nasional Indonesia melalui program tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Program MAMPU dapat membantu banyak perempuan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan sosial melalui mitra yang ada.

Keempat tulisan di atas telah berhasil dalam membuktikan bahwa Program MAMPU berdampak positif dalam isu kekerasan dan pemberdayaan perempuan

yang ada di Indonesia. Namun tidak ada yang berfokus kepada apakah keberhasilan Program MAMPU ini telah berjalan sesuai dengan teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral. Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan perspektif baru dalam topik analisis kesesuaian Program MAMPU terhadap teori dan konsep tersebut.

1.5.1 Feminis Liberal

Teori feminisme liberal ini pada awalnya tokoh pertama yang menciptakan teori tersebut adalah Mary Wollstonecraft tahun 1792 dalam bukunya yang berjudul “*A Vindication of the Rights of Women*” yang berpendapat bahwa rasionalitas, hukum kodrat dan keselarasan hak antara laki-laki dengan perempuan (Arivia, 2003). Pemikiran dari Wollstonecraft tersebut adalah pendapat feminis yang berada di Inggris pada saat pertama kali. Di sini Wollstonecraft menginginkan hak dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Menurut Wollstonecraft, jika hak dan kesempatan ini dibagikan maka perempuan akan bebas dari ketergantungan ekonomi sehingga bisa menghindarkan kemiskinan terhadap perempuan (A. Lubis, 2006).

Teori ini digunakan untuk teori *gender equality* antara laki-laki dan perempuan, tentunya dengan menunjukkan perpindahan bagi hak-hak perempuan (Suhanjatisukri & Sri, 2002). Teoritis feminis di awal untuk mengemukakan ide bahwa para perempuan adalah makhluk yang sama dengan para laki-laki, dan tentunya juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Teori feminisme liberal memperjuangkan bagaimana perempuan wajib mengikuti partisipasi dalam pembangunan. Mereka berpendapat bahwa keterbelakangan perempuan dari bagian ekonomi. Mereka membuat konsep, konsep ini adalah konsep yang akan menyertakan perempuan, yang disebut sebagai *Women in Development*, diadakannya konsep ini karena mereka beranggapan bahwa perempuan dinilai menjadi masalah bagi perekonomian saat ini. Menurut pendapatnya, ketertinggalan perempuan salah satunya karena para perempuan dapat dikatakan tidak berpartisipasi politik maupun pembangunan. Hal tersebut membuat mereka melibatkan perempuan dalam proses sosial ekonomi dan program pembangunan sebagai cara untuk melibatkan kedudukan perempuan (Mosse, 1996).

Feminisme liberal memandang bahwa penindasan terhadap perempuan ini ada, karena para perempuan belum disediakan dapat melakukan haknya sebagai makhluk rasional dan bebas. Bagi kaum tersebut kebebasan muncul pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat, publik, kesempatan, dan hak bagi perempuan. Feminisme liberal dalam melawan masalah kemasyarakatan dirancang untuk mendorong persamaan kesempatan dan persamaan hak bagi setiap manusia, termasuk hak dan kesempatan perempuan. Kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki dan perempuan ini penting, dan oleh karena itu peluang antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dibedakan (Faqih, 2006).

Ada dua cara untuk meraih feminisme liberal, pertama dengan meningkatkan kesadaran secara psikologis, antara lain dengan membahas pengalaman dari para perempuan dalam masyarakat yang mayoritasnya adalah laki-laki. Kedua, menginginkan reformasi hukum untuk keuntungan perempuan dan mengubah peraturan tersebut merupakan peraturan baru yang memperhatikan perempuan sama dengan laki-laki, yaitu hidup bersama dalam dasar kesetaraan (Yunahar & Ilyas, 1998).

Feminis liberal juga berpendapat bahwa sistem hukum terhadap perempuan merupakan hal yang terkadang menyebabkan perempuan terpinggirkan, maka dari itu, kesetaraan hanya dapat dicapai dengan membuat sistem hukum tidak terlalu bias terhadap perempuan (Rosyidin, 2020). Inti dari teori feminisme liberal ini adalah untuk menyakinkan perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Dalam mewujudkan pencapaian hak dan kesempatan bagi perempuan, menyadarkan kesadaran psikologis hingga dihasilkannya aturan berupa undang-undang, adalah hal yang berat bagi sebuah negara untuk dilakukan karena kurangnya kemampuan dalam tata kelola. Oleh karena itu, dengan adanya kerja sama bilateral antara dua negara dapat membantu mewujudkan keadaan-keadaan yang seharusnya dimiliki oleh semua perempuan. Pada bagian selanjutnya, akan memaparkan

tentang bagaimana kerja sama bilateral antara dua negara dapat dilakukan.

1.5.2 Kerja Sama Bilateral

Dalam buku yang berjudul "*Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*" menurut Teuku May Rudy, dalam membangun kerja sama bilateral, masing-masing negara harus memiliki tujuan. Maka dari itu, setiap negara yang bersangkutan wajib menguraikan strategi yang selaras dengan kepentingan-kepentingan setiap negara (Rudy, 2002). Sedangkan, dalam buku yang berjudul "*Bilateral Diplomacy*" yang ditulis oleh Kishan S Rana, berpendapat bahwa "Dalam diplomasi bilateral konsep yang utama untuk dipakai merupakan suatu negara akan mengejar kepentingan nasionalnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan caranya merupakan dengan membuat hubungan baik dan jangka panjang antar negara yang bersangkutan." (Rana, 2002).

Berdasarkan politik internasional, kerja sama bilateral adalah situasi yang menciptakan adanya hubungan saling menguntungkan antar negara. Negara bersangkutan yang mengikuti kerja sama bilateral diharapkan untuk memiliki keuntungan dan juga dapat meningkatkan perdamaian di dalam negara masing-masing (Ramadhan, 2016).

Adapun acuan kerja sama bilateral yang melingkupi prosedur:

1. Respon dari negara yang menjadikan kerja sama
2. Persepsi dari pembuat keputusan di negara penerima

3. Aksi balik dari negara penerima keputusan
4. Persepsi dari pembuat keputusan dari negara yang menjadikan kerja sama (Perwita & Yani, 2005).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Feminisme: Feminis adalah mereka yang menginginkan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama dalam kesamaan haknya (Hastanti, 2004). Strategi atau gerakan yang berpusat pada ketidaksetaraan di antara laki-laki dan perempuan (Jackson & Sorensen, 2013).

1.6.1.2 Kesetaraan Gender: Hubungan antara pekerjaan dan aspek lain dari kehidupan seseorang, seperti keluarga dan pendidikan. Harus ada kesempatan yang sama bagi setiap orang, tanpa memandang usia atau jenis kelamin mereka, untuk berkembang dalam kehidupan. Akses dan kendali atas sumber daya dan keuntungan yang adil dan merata harus tersedia bagi semua orang (Haspels & Busakorn, 2005).

1.6.1.3 Kemiskinan Perempuan: Memenuhi kebutuhan mendasar seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain merupakan tantangan dalam konteks kemiskinan. Kemiskinan harus dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya gender. Pria dan wanita mengalami kemiskinan dengan cara yang berbeda, itulah sebabnya perbedaan ini dibuat. Gender membuat semua perbedaan, dengan perempuan menjadi yang termiskin di dunia (Indraswari, 2009).

1.6.1.4 Hak Asasi Manusia: Hakikat pribadi manusia tidak dapat dipisahkan dari hak-hak yang melekat pada dirinya, artinya setiap manusia memiliki hak-hak tersebut sebagai hasil ciptaan Tuhan (Sarinah, 2017). Hak asasi manusia juga merupakan hak yang datang dengan menjadi manusia; tanpa mereka, manusia tidak dapat berfungsi secara normal sebagai manusia (M. Lubis, 2019).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Feminisme: Penelitian ini menekankan feminisme dari Program MAMPU, yang mempunyai tujuan untuk perempuan dibantu mendapatkan hak nya yang bebas dengan tujuan untuk memberikan dan meningkatkan akses perempuan miskin kepada layanan penting dan program pemerintah untuk mencapai pemberdayaan dan kesetaraan serta mendukung Pemerintah Indonesia.

1.6.2.2 Kesetaraan Gender: Kesetaraan gender pada penelitian ini adalah di antara laki-laki dan perempuan tersebut harus memiliki kesamaan kesempatan, perlakuan, dan penilaian. Dalam Program MAMPU, Indonesia sendiri telah membentuk kerja sama bersama dengan Australia karena menurut kedua negara ini kesetaraan gender ini adalah salah satu termasuk poin penting yang ingin diraih dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang kelima yaitu *gender equality*, dan semua kerja sama di bidang mana pun, kesetaraan gender tersebut selalu menjadi prinsip dan satu area prioritas oleh Indonesia dan Australia.

1.6.2.3 Kemiskinan Perempuan: Penelitian ini akan berfokus untuk melihat kemiskinan perempuan dalam masyarakat. Adapun indikator-indikator dalam Program MAMPU tersebut meliputi (1) Meningkatkan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial, (2) Meningkatkan Kondisi Pekerjaan dan Menghapuskan Diskriminasi di Tempat Kerja, (3) Meningkatkan Kondisi Migrasi Buruh Perempuan ke Luar Negeri, (4) Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Perempuan, (5) Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan.

1.6.2.4 Hak Asasi Manusia: Dalam penelitian ini menekankan bahwa perempuan di Indonesia juga memiliki hak asasi manusia yang sebagaimana harusnya.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa Program MAMPU telah berjalan sesuai teori feminis liberal karena dapat membuat perempuan sadar secara psikologis bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan dan juga menghasilkan beberapa perubahan hukum di Indonesia tentang perempuan. Di sisi lain, dengan tercapainya tujuan dalam Program MAMPU ini telah berhasil mewujudkan kerja sama antara Indonesia dengan Australia sesuai dengan konsep kerja sama bilateral.

1.8 Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis akan memakai metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang mewujudkan data deskriptif berbentuk ucapan atau tulisan dan tindakan yang dapat dipelajari dari subyek itu sendiri dan menekankan pada makna dibalik suatu fenomena (Lamont, 2015). Dalam menggunakan metode penelitian kualitatif penulis berusaha untuk menjelaskan capaian-capaian pada Program MAMPU yang sesuai dalam teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral. Selain itu penelitian ini juga hendak menganalisis kesesuaiannya.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang berjenis deskriptif analisis. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan metode yang tujuannya untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada, yang berjalan pada saat ini atau saat yang sudah terjadi (Furchan,

2011). Penelitian ini akan mencoba menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan “Bagaimana kerja sama Indonesia dengan Australia selama menjalankan program MAMPU selama delapan tahun di Indonesia?”

1.8.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian yang memiliki unsur-unsur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Faktor-faktor yang saling berhubungan tersebut meliputi keberadaan pelaku, kegiatan, dan lokasi yang tepat untuk memperoleh data dan menganalisis (Nasution, 2003). Lokasi penelitian harus memenuhi berbagai syarat, yaitu memiliki kesesuaian dengan substansi penelitian, mampu memberi dan memberikan data yang dibutuhkan, serta mampu menerima kehadiran peneliti dalam kurun waktu tertentu (Sugiyono, 2012). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis akan menetapkan situs penelitian di Jakarta, Indonesia. Secara khusus penelitian ini akan melakukan penelitian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang bertempat di Jakarta. Dengan adanya penetapan terhadap situs penelitian, diharapkan dapat memperoleh informasi serta data yang bermanfaat terkait dengan penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memainkan peran penting dalam studi yang mengumpulkan data untuk analisis. Diharapkan bahwa banyak subjek penelitian akan menghasilkan data dan informasi yang berguna untuk komposisi analisis terkait penelitian tersebut (Sugiyono, 2012). Beberapa subjek penelitian tersebut

adalah Ibu Qurrota Ayun sebagai Koordinator Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan BAPPENAS yang bertugas selama pelaksanaan Program MAMPU dan Ibu Triashtra Lakshmi sebagai Koordinator Spesialis Area Tematik 1 & 4 Program MAMPU.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini akan memakai jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang memiliki kalimat, kata, atau gambar (Sugiyono, 2012). Terdapat dua jenis data di dalam penelitian kualitatif:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama (Hasan, 2002). Contohnya seperti wawancara dengan narasumber, lalu melalui kuesioner, dan lain-lain. Di dalam penelitian ini penulis akan lakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan kerja sama Indonesia dan Australia melalui program MAMPU, yaitu, Ibu Qurrota Ayun sebagai Koordinator Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan BAPPENAS yang bertugas selama pelaksanaan Program MAMPU dan Ibu Triashtra Lakshmi sebagai Koordinator Spesialis Area Tematik 1 & 4 Program MAMPU.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui peneliti dari sumber yang sudah ada (Hasan, 2002). Contohnya seperti buku, jurnal, artikel, dan berita-berita terkait dengan kerja sama Indonesia dengan Australia melalui Program MAMPU. Dengan menggunakan data kualitatif maka sesuai dengan penelitian

yang berusaha untuk menganalisis secara mendalam dan menjawab pertanyaan “Bagaimana kerja sama Indonesia dengan Australia selama menjalankan Program MAMPU selama delapan tahun di Indonesia?”

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini akan bersumber dari data kualitatif yaitu data primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Data Primer

Penelitian ini akan menggunakan salah satu jenis data primer yaitu wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber-narasumber yang berkaitan dengan topik kerja sama Indonesia dengan Australia dalam hak perempuan dan kesetaraan gender. Beberapa narasumber tersebut adalah Ibu Qurrota Ayun sebagai Koordinator Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan BAPPENAS yang bertugas selama pelaksanaan Program MAMPU dan Ibu Triashtra Lakshmi sebagai Koordinator Spesialis Area Tematik 1 & 4 Program MAMPU. Dengan adanya wawancara ini diinginkan dapat memperoleh data serta informasi yang berguna untuk penelitian ini.

2. Data Sekunder

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu dari sumber yang sudah ada, contohnya seperti buku, jurnal, artikel, dan berita-berita terkait dengan kerja sama Indonesia dan Australia melalui Program MAMPU.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan *online research* yang termasuk dalam teknik pengumpulan *desk research*. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan *literature review* dari buku, jurnal, artikel, dan berita-berita terkait. Penulis juga akan berusaha untuk menyediakan salah satu data primer yaitu wawancara dengan narasumber sebagai data dari penelitian ini. Penulis berencana akan mewawancarai Ibu Qurrota Ayun sebagai Koordinator Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan BAPPENAS dan Ibu Triashtra Lakshmi sebagai Koordinator Spesialis Area Tematik 1 & 4 Program MAMPU.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan metode kongruen. Metode kongruen ini adalah mencari kecocokan variabel independent dari kerangka pemikiran yang digunakan dan data-data yang didapatkan selama penelitian. Variable independent dalam penelitian ini adalah program MAMPU, sedangkan variabel dependennya adalah kemiskinan terhadap perempuan. Jadi, Program MAMPU telah mempengaruhi kemiskinan terhadap perempuan di Indonesia dengan menghasilkan hasil pencapaian dan keberhasilannya yang telah dicapai. Selain itu, peneliti juga mengartikan data dengan menggunakan teori yang dibawa untuk melihat apakah asumsi kerangka pemikiran tersebut cocok dengan data yang didapatkan oleh penulis. Kerangka pemikiran yang dibawa oleh penulis untuk penelitian ini adalah teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral.

1.8.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab yang akan dijabarkan di bawah ini:

BAB I: Bab ini membahas mengenai bagian pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori yang hendak digunakan sebagai alat analisis, beserta hipotesis atau dugaan awal penulis. Pada bab ini juga memuat rancangan desain penelitian yang tercantum dalam subbab metodologi penelitian.

BAB II: Bab ini akan menjelaskan dan menganalisis tentang Program MAMPU, bagaimana awal dari Program MAMPU tersebut dimulai dan profil serta tema Program MAMPU.

BAB III: Bab akan mengenai bagaimana kesesuaian pencapaian pada Program MAMPU terhadap teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral.

BAB IV: Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan pemberian saran-saran dari hasil penelitian.

1.8.9 Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas data dari penelitian ini juga dapat dilihat melalui kerangka pemikiran yang digunakan. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal dan konsep kerja sama bilateral dengan menggunakan data-data yang berkualitas dalam menyusun penelitian ini.

